

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2024



DINAS SOSIAL

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan lancar. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial selama 1 (satu) Tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Sosial merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1(satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan menyelaraskan Usulan/Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang Terencana, Terarah, Terintegrasi dan Berkesinambungan dari setiap Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada setiap Tahun Anggaran.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam Pengambilan Kebijakan guna mengurangi Kesenjangan Pelayanan di Bidang Sosial.

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun-tahun berikutnya.

Praya, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LL. WIRANINGSUN, MH.

NIP.19640917 198703 1 017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang aktual dan berhasil guna sejalan dengan pembangunan di bidang lainnya.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk Periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Sosial mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. RENJA-SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan Kegiatan dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. RENJA merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
- c. RENJA-SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD sebagai wujud dari kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024.

Mengingat pentingnya Dokumen RENJA-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah, maka hendaknya dari mulai awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya secara baik dan benar.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu SKPD teknis yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang ada yaitu melaksanakan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi Program :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang(UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(Perpu);
4. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 1 Desember 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penetapan RENJA dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor sosial tahun berjalan.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA adalah:

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Sebagai acuan dalam menuangkan Program/Kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
3. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Program dan Kegiatan Bidang Sosial.
4. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Sosial.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2022.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2022 yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 22.477.417.643 ,-** dengan capain realisasi kinerja fisik sebesar **99%** dan capain realisasi keuangan sebesar **Rp. 21.039.547.082 (93,60%).**

Implikasi yang timbul terhadap Capaian Program Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah adalah Persentase Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 78,13 % dan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya sebesar 100 %. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2022 :

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang dibina	73,81 %	69,73 %	50,15 %	70,10 %	139,78 %	61,64 %	201,47 %	272,96 %	
1	06	02	2.02	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang tersosialisasi UGB/PUB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Lembaga yang mengikuti Sosialisasi UGB/PUB Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 5 Dokumen	0 8 Dok	35 Lembaga 5 Dok	35 Lembaga 15 Dok	100% 300%	0 5 Dokumen	35 lembaga 28 Dokumen	0% 560%
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya	73,81 %	69,73 %	50,15 %	70,10 %	139,78 %	61,64 %	201,47 %	272,96 %	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	0	30 org	30 org	100%	25 Orang	55 orang	220%
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100%	12 orang	36 orang	300%
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 LKS	24 LKS/24KT	30 LKS/30KT	30 LKS/30KT	100 %	20 LKS	74 LKS/54KT	370 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah pengelola LK3 yang dibina	0	0	0	0	0	10 orang	0	0 %
						Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan SDM dan LK3 Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	0	0	0	0	1 Sertifikat	0	0 %
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	73,69 %	66,79 %	61,71 %	64,03 %	1,22 %	70,43%	201,25%	273,10 %
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar ,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yg mendapatkan layanan kebutuhan dasarnya	920 orang	1.140 orang	639 orang	639 orang	100 %	2.460 orang	4.239 orang	460,76%
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	1.062 org	540 org	540 org	100 %	1.050 Orang	2.652 orang	530,40%
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	0	50 org	50 org	100%	1.050 orang	1.100 org	1.100%
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 orang	66 org	49 org	49 Org	100 %	120 orang	235 org	180,77 %
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	0	0	0	0	65 Orang	65 org	118,18%
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	0	0	0	0	50 orang	50 orang	83,33%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan dan Rujukan	Jumlah Orang mendapatkan layanan rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	0	0	0	0	70 org	0	0 %
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar dan pengaduan	0,67 %	0,39 %	0,50 %	3,47 %	694 %	0,63 %	4.49 %	670,15 %
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dokumen Data dan Pengaduan yang dimiliki	2 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	5 Dok	250 %
						Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.550 org	0	1.750	5.425 org	310%	1.750 org	7.175 org	462,90%
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	277 orang	166 org	270 org	270 Org	100 %	250 orang	686 org	247,65%
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	70 org	75 org	75 org	100 %	120 org	265 org	220,83%
1	06	04	2.02	14	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Yang Ditangani	60 kasus	92 Kasus	50 Kasus	59 Kasus	118 %	60 Kasus	211 kasus	351,67%
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	60 Dokumen	92 dok	50 Dok	59 dok	118%	60 Dokumen	211 dok	351,67%
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin dan anak terlantar yang ditangani	2,20 %	0,31 %	0,98 %	6,35 %	647.96 %	1,85%	8,51 %	386,82%
						Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	630 orang	90 org	11.876 org	9.480 org	79.82 %	530 orang	10.100 org	1.603,17%
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir miskin yang difasilitasi data dan yang mendapatkan bantuan sosial	190.000 KPM	0	190.031 KPM	116.720 KPM	61,42%	190.000 KPM	306.720 KPM	161,43%
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Jumlah Fakir Miskin yang dilakukan perbaikan	190.000 KPM	0	190.031	116.720	61,42%	190.000	306.720	161,43%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Daerah Kabupaten/Kota	datanya			KPM	KPM		KPM	KPM	
						Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	190.000 KPM	0	190.031 KPM	116.720 KPM	61,42%	190.000	306.720 KPM	161,43%
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan Bansos Kesejahteraan Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	130.370 KPM (BPNT) dan 92.000 KPM (PKH)	93.816 KPM (BPNT) dan 70.485 KPM (PKH)	130.370 KPM (BPNT) dan 85.000 KPM (PKH)	116.720 KPM (BPNT) dan 58.745 KPM (PKH)	89,53 % dan 69,11 %	130.370 KPM (BPNT) dan 92.000 KPM (PKH)	340.906 KPM Dan 221.230 KPM	261,49% dan 240,47%
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	600 orang	90 org	0	0	0 %	500 orang	590 orang	98,33%
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300%
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300%
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat(Pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	400 orang	694 org	400 orang	1.276 orang	319 %	400 orang	2.370 org	592,50%
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat(Pengungsian) dan pasca Bencana kewenangan kabupaten/kota	400 orang	0	0	0	0	400 orang	400 org	100%
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	% Tanaga Yang Memenuhi Standar Kompetensi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	1 KSB	0	0	0	0	1 KSB	0	0%
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100 %	40 Orang	120 Orang	300%
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	% Sarana dan Prasarana TMPNK yang layak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300%
					Jumlah TMP Daerah yang dikelola	1 TMP Daerah	1 TMP Daerah	1 TMP Daerah	1 TMP Daerah	100%	1 TMP Daerah	3 TMP Daerah	300%	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMPNK yang mendapatkan pemeliharaan dan pengamanan	1 TMPNK	1 TMPNK	1 TMPNK	1 TMPNK	100 %	1 TMPNK	3 TMPNK	300%
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	TMPNK yang mendapatkan pemeliharaan	1 TMPNK	1 TMPNK	1 TMPNK	1 TMPNK	100 %	1 TMPNK	3 TMPNK	300%
						Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaann pada TMPNK	1 Makam	0	0	0	0	1 Makam	1 Makam	100%
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI SAKIP OPD	B	B	B	B	B	B	B	B
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300%
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	7 Dokumen	8 Dok	8 Dok	8 Dok	100 %	7 Dok	23 dok	328,57%
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	5%	0 %	5%	0 %	0 %	5 %	5%	100%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	300%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan SKPD	13 Dokumen	13 Dok	13 Dok	13 Dok	100 %	13 Dok	39 Dok	300%
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan capaian kinerja lebih dari 80 %	90 %	90 %	90 %	90 %	100%	90 %	270 %	300 %
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas ASN	3 Orang	0	0	0	0	3 Orang	3 Orang	100%
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	300%
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 buah	3 buah	3 buah	3 buah	100 %	31 buah	37 buah	115,63%
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum	27 kali	25 kali	25 kali	25 kali	100 %	25 kali	75 kali	277,78%
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	11 laporan	17 laporan	154,55%
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Validasi Data Barang Milik Daerah	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	0%
1	06	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Operasional	0	0	0	0	0	1 Unit	1 Unit	0%
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Layanan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	300%
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Internet, Layanan Air dan Layanan Listrik	6.000 MB, 3.240 M3, 22.000 Kwh	6.000 MB, 3.240 M3, 22.000 Kwh	6.000 MB, 3.240 M3, 22.000 Kwh	6.000 MB, 3.240 M3, 22.000 Kwh	100 %	6.000 MB, 3.240 M3, 22.000 Kwh	18.000 MB, 9.720 M3, 66.000 Kwh	100%
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	300%
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	270 %	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2			3			4		5	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100 %	29 Unit	69 unit	237,93 %
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Barang Milik Daerah yang diservice	25 Unit	23 Unit	23 Unit	6 Unit	26,09 %	26 Unit	55 unit	220 %
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terpelihara/direhab	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	3 Unit	300 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

Persentase penanganan PMKS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2022 sebesar 78,13 %, Jumlah PMKS yang ditangani pada Tahun 2022 sebanyak 148.469 Orang dari jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 190.031 Orang, sementara untuk Program Penanganan Bencana dengan Sasaran Indicator berupa Cakupan Penanganan Korban Bencana sebesar 100 %. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial baik Tujuan maupun Sasaran sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Graduasi mandiri	-	-	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0.06%	-	0,01%	0,01%	
2	Persentase Cakupan PMKS	v	-	80,27%	80,27%	80,27%	80,27%	78,13%	-	80,27%	80,27%	
3	Persentase Penanganan Bencana	v	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4	Cakupan Penanganan Korban Bencana	v	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2022 sudah tergolong baik, realisasi dari target tersebut mencapai angka 78,13 %, dimana jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 148.469 orang.

Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

- a. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah masih belum memiliki Panti Rehabilitasi atau Penampungan sendiri yang digunakan untuk melayani para PMKS, sehingga sangat bergantung pada daya tampung dari Panti Sosial dan Rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan penanganan masalah sosial di Kabupaten Lombok Tengah, karena daya tampung panti-panti tersebut pun sangat terbatas.
- b. Sudah diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Lombok Tengah maka diharapkan secara anggaran tentunya dapat ditingkatkan dalam rangka penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Posisi Kabupaten Lombok Tengah sebagai Penyangga ibukota provinsi sekaligus pusat Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan tingkat urbanisasi ke Kabupaten Lombok Tengah yang cukup tinggi setiap tahunnya, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya permasalahan PMKS Jalanan (Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Wanita Tuna Susila), karena kaum urban tersebut sebagian besar tidak memiliki keterampilan dan kualifikasi yang cukup untuk masuk ke dunia kerja di Kabupaten Lombok Tengah.
- d. Penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan atau perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibilities*) masih bersifat parsial tidak terorganisir dengan baik, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.

- e. Jumlah SDM pada Dinas Sosial yang kurang memadai, dan sampai dengan saat ini Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah masih belum memiliki Pejabat Fungsional Pekerja Sosial.
- f. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, dimana apabila Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah hanya mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Lombok Tengah tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

- a. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Lombok Tengah terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan sosial sebagai salah satu Misi dari Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan penanganan PMKS merupakan salah satu prioritas daerah.
- b. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap penanggulangan permasalahan sosial di Kabupaten Lombok Tengah yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Dukungan dari para *stakeholders* (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.
- d. Trend alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari APBD Kabupaten Lombok Tengah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah saat ini memang sangat memprihatinkan terutama permasalahan-permasalahan yang sifatnya kasat mata seperti permasalahan PMKS Jalanan.

Penanggulangan PMKS Jalanan ini perlu ditindaklanjuti secara komprehensif, dimana permasalahan tersebut timbul dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi, permasalahan keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Lombok Tengah perlu memformulasikan program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat mengakomodir semua kalangan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah terkait penanganan Peyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sudah semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sudah diakomodir. Untuk kondisi Anggaran Tahun 2024 belum sesuai dengan kebutuhan yang ada dan ke depannya tidak terjadi lagi refocusing. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lombok Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
/	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.089.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.089.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Praya	Laporan Kinerja SKPD	7 Dokumen	70.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Praya	Laporan Kinerja SKPD	7 Dokumen	70.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.060.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.060.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Praya	Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 27 Orang/bulan	3.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Praya	Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 27 Orang/bulan	3.000.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Praya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan SKPD	13 Dokumen	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Praya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan SKPD	13 Dokumen	60.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah	Peningkatan Kapasitas ASN	3 org	40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar daerah	Peningkatan Kapasitas ASN	3 org	40.000.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah				467.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				467.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Praya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 buah	320.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Praya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 buah	320.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Praya	Makan Minum	27 Kali	37.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Praya	Makan Minum	12 Kali	37.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Laporan Hasil Rakor dan Konsultasi	11 Laporan	110.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Hasil dan Konsultasi	3 Laporan	110.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan operasional		0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kendaraan operasional		0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Praya	Layanan Internet, Layanan Air dan Layanan Listrik	12 Bulan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Praya	Layanan Internet, Layanan Air dan Layanan Listrik	12 Bulan	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Praya	Layanan Umum Kantor	12 Bulan	65.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Praya	Layanan Umum Kantor	12 Bulan	65.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				327.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				327.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Praya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit	270.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Praya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	29 Unit	270.000.000	

			yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya STNK Kendaraan Dinas Operasional yang diperbaharui					Pajak dan Perizinannya STNK Kendaraan Dinas Operasional yang diperbaharui			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Praya	Barang Milik Daerah yang diservice	25 Unit	17.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Praya	Barang Milik Daerah yang diservice	25 Unit	17.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Praya	Gedung Kantor yg terpelihara/direhab	1 Unit	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Praya	Gedung Kantor yg terpelihara/direhab	1 Unit	40.000.000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				429.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				429.000.000	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				45.000.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				45.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Lembaga yang mengikuti Sosialisasi UGB/PUB	5 Dokumen	45.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Lembaga yang mengikuti Sosialisasi UGB/PUB	5 Dok	45.000.000	

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				384.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				384.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Praya,	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	36.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Praya	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	36.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Praya	Jumlah TKSK yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	120.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Praya	Jumlah TKSK yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	120.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan,	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	180.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kecamatan,	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Lembaga	180.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Praya	Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan SDM dan LK3 Kewenangan Kabupaten/Kota	1 sertifikat	48.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Praya	Jumlah Sertifikat yang dari hasil Peningkatan SDM dan LK3 Kewenangan Kabupaten/Kota	1 sertifikat	48.000.000	
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				50.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				50.000.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				50.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				50.000.000	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk	Dari Luar Negeri	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari	200 org	50.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	Dari Luar Negeri	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah	200 org	50.000.000	

	dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Titik Debariasi di Daerah Propinsi untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/kota			untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Propinsi untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/kota			
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.207.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				3.037.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				930.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				2.760.000.000	
	Penyediaan Permakanan	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	265.000.000	Penyediaan Permakanan	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	265.000.000	
	Penyediaan Sandang	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun	100 Orang	50.000.000	Penyediaan Sandang	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun	100 Orang	50.000.000	
	Penyediaan Alat Bantu	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	130.000.000	Penyediaan Alat Bantu	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	130.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	12 Kecamatan,	Jumlah peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	55 org	150.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	12 Kecamatan,		55 org	150.000.000	

	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	75.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	75.000.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.550 Orang	170.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	12 Kecamatan,	Data DTKS, Data PMKS dan Data PSKS	1.750 Orang	2.000.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	12 Kecamatan,	Jumlah Orang mendapatkan layanan rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 org	90.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	12 Kecamatan,	Jumlah Orang mendapatkan layanan rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 org	90.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				277.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				277.000.000	
	Penyediaan Permakanan	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mendapatkan	277 Orang	97.000.000	Penyediaan Permakanan	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mendapatkan	277 Orang	97.000.000	

			Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	12 Kecamatan,	Jumlah Peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	120.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	12 Kecamatan,	Jumlah Peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	120.000.000	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12 Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	60 Dokumen	60.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12 Kecamatan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	60 Dokumen	60.000.000	
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				4.130.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				4.130.000.000	
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				30.000.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				30.000.000	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	12 Kecamatan,	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota	30 Org	30.000.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	12 Kecamatan,	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota	30 Org	30.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				4.100.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				4.100.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan,	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan	190.000 KPM	800.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	12 Kecamatan,	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan	190.000 KPM KPM	800.000.000	

			Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	12 Kecamatan,	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	92.000 KPM(PKH) 130.370 KPM(BPNT)	1.800.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	12 Kecamatan,	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	92.000 KPM(PKH) 130.370 KPM(BPNT)	1.800.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	12 Kecamatan,	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	1.500.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	12 Kecamatan,	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	1.500.000.000	
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.130.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.130.000.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				880.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				880.000.000	
	Penyediaan Makanan	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	720.000.000	Penyediaan Makanan	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	720.000.000	
	Penyediaan Sandang	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang mendapatkan	400 Orang	60.000.000	Penyediaan Sandang	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan	400 Orang	60.000.000	

			Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat(Pengungsi an) dan pasca Bencana kewenangan kabupaten/kota					kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat(Pengungsi an) dan pasca Bencana kewenangan kabupaten/kota			
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Loteng	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	1 unit	50.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Loteng	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	1 unit	50.000.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Loteng	Junlah korban bencana yg mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	400 org	50.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Loteng	Junlah korban bencana yg mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	400 org	50.000.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				250.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				250.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Loteng	Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	1 KSB	150.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Loteng	Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	1 KSB	150.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	40 Orang	100.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	12 Kecamatan,	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	40 Orang	100.000.000	

			Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				220.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				220.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				220.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				220.000.000	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Praya	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarpras TMPNK	1 Dokumen	160.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Praya	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarpras TMPNK	1 Dokumen	160.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Praya	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	30.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Praya	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	30.000.000	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Praya	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan TMPNK	1 Laporan	30.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Praya	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan TMPNK	1 Laporan	30.000.000	
	Jumlah				11.255.000.000					13.085.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan Tahun 2024 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun stake holder lainnya belum ada karena Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023 belum dilaksanakan.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lombok Tengah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;

- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar; Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- e. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- f. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah ialah:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial; Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

- a. Berdasarkan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- e. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

Berdasarkan tujuan di atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai

yaitu :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS
2.	Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan penyandang cacat	Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri
		Meningkatnya penanganan PMKS Jalanan (WTS, gepeng, dan Anak Jalanan)	Prosentase gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan perilaku Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku
		Meningkatnya penanganan Keluarga Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya Prosentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya
		Meningkatnya penanganan Korban <i>Trafficking</i> dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Prosentase korban KDRT dan <i>Trafficking</i> yang pulih kondisi psikologisnya
		Meningkatnya penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami perubahan perilaku
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan korban bencana alam/sosial	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari
		Meningkatnya penanganan Lanjut Usia dan Anak Terlantar di Luar dan Dalam Panti	Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terlayani Prosentase Anak Terlantar yang terlayani

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2024 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024.

Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada Tahun 2024 sesuai dengan tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada Tahun 2024
Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	6
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS	Meningkatnya PMKS yang ditangani	Persentase Cakupan PMKS	78,13 %	80,27 %	80,27 %
2.	Cakupan Penanganan Bencana	Optimalisasi Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan Korban Bencana	100 %	100 %	100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

		Daerah
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lombok Tengah oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Ada 6 Program, 13 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 11.267.000.000,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagaimana tabel 4.1. dibawah ini :

Tabel. 4.1.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Lombok Tengah

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									11.267.000.000			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									4.049.000.000		
1	06	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									70.000.000	
1	06	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP OPD	Laporan Kinerja SKPD	Persentase IKU OPD yang tercapai	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Predikat	8 Dokumen	100 %	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3.060.000.000	
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP OPD	Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Laporan Keuangan SKPD	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Predikat	12 Bulan 27 Orang	100 %	3.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan SKPD	Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Laporan Keuangan SKPD	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Predikat	13 Dokumen	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									467.000.000	

1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Hasil Rakor dan Konsultasi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Predikat	11 Laporan	100 %	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							125.000.000		
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP OPD	Layanan Internet, Layanan Air dan Layanan Listrik	Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Predikat	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP OPD	Layanan Umum Kantor	Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Predikat	12 Bulan	12 Bulan	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							327.000.000		
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya STNK Kendaraan Dinas Operasional yang diperbaharui	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Predikat	29 Unit	90 %	270.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP OPD	Barang Milik Daerah yang diservice	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Predikat	25 Unit	90 %	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	01	2,09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Nilai SAKIP OPD	Barang Milik Daerah yang diservice	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	B Predikat	1 Unit	90 %	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							381.000.000		
1	06	02	2,02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							45.000.000		
1	06	02	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase PSKS yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Lembaga yang mengikuti Sosialisasi UGB/PUB	Persentase PSKS yang dibina	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,81 %	5 Dokumen	73,81 %	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							336.000.000		
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi	Persentase PSKS	Jumlah Orang Mendapat	Persentase PSKS	Kab. Lombok Tengah,	73,81 %	25 Orang	73,81 %	36.000.000	Dana Transfer

1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Dibina	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,64 %	20 Lembaga	73,81 %	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1.262.000.000		
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							1.105.000.000		
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan dasar diluar Panti Sosial	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,69 %	500 Orang	920 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan dasar diluar Panti Sosial	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,69 %	100 Orang	920 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan dasar diluar Panti Sosial	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,69 %	130 Orang	920 Orang	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	04	2,01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk	Persentase	Jumlah Orang yang	Jumlah	Kab. Lombok Tengah,	73,69 %	60 Orang	920 Orang	75.000.000	Dana Transfer

1	06	04	2,01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan dasar diluar Panti Sosial	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,69 %	1.550 Orang	920 Orang	700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							157.000.000		
1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA diluar Panti sosial yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar dan pengaduan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,69 %	277 Orang	0,67 %	97.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	04	2,02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA diluar Panti sosial yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar dan pengaduan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,69 %	60 Dokumen	0,67 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							4.700.000.000		
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							4.700.000.000		
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin dan anak	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan	Jumlah Fakir Miskin Yang	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan,	630 orang	190.000 KPM	190.000 KPM	700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana

1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Yang difasilitasi data dan yang mendapatkan bantuan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	530 orang	92.000 KPM (PKH) 130.370 KPM (BPNT)	92.000 KPM (PKH) 130.370 KPM (BPNT)	2.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah fakir miskin dan anak terlantar yang tertangani	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Yang difasilitasi data dan yang mendapatkan bantuan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	630 orang	600 Orang	190.000 KPM	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							845.000.000		
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							720.000.000		
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	400 Orang	100 %	720.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							125.000.000		
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga yang memenuhi Standar Kompetensi	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	100 %	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							30.000.000		
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							30.000.000		
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMPNK Daerah yang dikelola	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana TMPNK yang Layak	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 TMPNK	1 Makam	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. L. WIRANINGSUN, MH.

NIP.19640917 198703 1 017